

15. URUSAN PERSANDIAN

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Urusan Persandian pada tahun 2018 diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 mulai mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pencapaian urusan Persandian. berjumlah total **Rp80.00.000,-** dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar **Rp63.135.000,-** atau mencapai 78.92%. Belanja urusan Persandian bisa diuraikan pada tabel berikut:

Tabel IV.C.15. 1

Program dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian Tahun 2018

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	80.000.000	63.135.000	78.92%
1	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	80.000.000	63.135.000	78.92%
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Total Belanja	80.000.000	63.135.000	78.92%

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2018 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Perkembangan pemanfaatan gelombang radio untuk mengirimkan informasi terbukti efektif dan efisien, dalam kasus jaringan listrik mati total yang diikuti juga dengan lumpuhnya jaringan komunikasi via operator telekomunikasi pemanfaatan gelombang radio dengan alat HT masih dimungkinkan, jaring komunikasi yang sudah ada semacam ORARI atau jaringan yang dimiliki oleh Pemkab sendiri bertukar informasi untuk kepentingan seperti dalam kasus kebencanaan, dengan demikian optimalisasi keamanan jaringan nirkabel yang berupa penambahan jumlah alat, maupun pemeliharannya dilakukan setiap tahun guna mengantisipasi kejadian tersebut.

c. Capaian Kinerja

Penyelenggaraan persandian yang dilakukan baik di pusat maupun di daerah adalah upaya untuk menanggulangi kerawanan terhadap data dan informasi yang masih belum optimal. Kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan tidak ada pengingkaran informasi yang disandikan. Capaian kinerja urusan persandian berdasarkan pada indikator RPJMD 2016-2021, terdiri dari tiga indikator yang mencapai target tahun 2018 yaitu rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian telah sepenuhnya tercapai.

Tabel IV.C.15. 2**Capaian Kinerja Urusan Persandian Berdasarkan Indikator RKPd Tahun 2018**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018			Status Capaian 2018	Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018		
1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan		1	0,8	1	125 %	0	0.8
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian		1	0,8	1	125 %	0	0.9
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian		1	0,8	1	125 %	0	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018

Keterangan Status Capaian:

0	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq$ 100 %
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian >80%- 99,99%
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian >40% dan <80%
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq$ 40%

Apabila ditinjau dari tabel di atas, juga dapat diketahui bahwa Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan telah sepenuhnya tercapai, dimana semua perangkat daerah telah melakukan pengamanan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

Persandian dalam arti luas mengalami perkembangan pemakaian, secara teknologi informasi persandian dapat diartikan memberikan enkripsi atas sebuah data/informasi yang memungkinkan data/informasi tidak dapat dibaca oleh orang/entitas yang tidak

IV.C.15. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian**

memiliki akses ke data/informasi tersebut dalam sebuah lalu lintas data.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Persandian, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel IV.C.15. 3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Persandian

No	Permasalahan	Solusi
1	Masalah keamanan kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi atau aplikasi.	▪ Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi melalui sosialisasi pengenalan persandian melalui pelatihan dengan harapan dapat mengurangi potensi ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. ▪ Menerapkan blue print Teknologi Informasi secara menyeluruh dengan mengedepankan sisi Keamanan dan pengamanan aset yang berupa informasi.
2	Keterbatasan SDM sandi yang dimiliki pemda dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi	Menganalisis, mengklasifikasikan informasi lalu menyandikan informasikan sesuai dengan kebutuhannya dan memberikan pengamanan kepada database dengan mempertimbangkan kecepatan akses dan otoritas yang akan mengakses informasi tersebut
3.	Belum ada program dan kegiatan yang khusus menasar urusan Persandian	Penetapan nomenklatur program dan kegiatan yang sesuai dengan urusan Persandian
4.	Pemahaman pentingnya persandian pada setiap urusan	Pada urusan tertentu persandian wajib di adakan sebagai contoh kasus yaitu untuk menangani kebencanaan, dalam pengiriman informasi dilakukan persandian walau sederhana tetapi efektif dilakukan
5.	Indikator urusan persandian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi persandian	▪ Mencari indikator untuk diusulkan dengan mempertimbangkan perkembangan persandian ▪ Memilah indikator baru sesuai dengan bidang-bidang yang menerapkan persandian dalam alur kerjanya